

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang salah satunya adalah kesehatan. Pengertian dari kesehatan tidak hanya sebatas sehat secara jasmani dan rohani, namun sehat secara mental, sosial dan spiritual yang dapat membuat manusia dapat menjalani hidup yang produktif dan ekonomis. Hak setiap masyarakat untuk memperoleh kesehatan tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan masyarakat sendiri dalam hal ini memegang peranan penting untuk dapat mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia.

Upaya dasar yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya tersebut dapat dijalankan melalui pelayanan kesehatan dengan adanya sumber daya manusia, fasilitas dan sarana kesehatan, serta perbekalan farmasi dimana salah satunya adalah obat – obatan. Sumber daya manusia sebagai pelaksana harus memiliki keahlian, kompetensi dan sertifikat agar dapat menjamin keamanan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan memiliki status legal dalam pelaksanaan pelayanan. Setelah sumber daya manusia telah memenuhi persyaratan, hal berikutnya yang harus diperhatikan yaitu sarana dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, apotek, klinik dan rumah sakit. Sarana dan fasilitas kesehatan merupakan tempat dimana dilakukannya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang membantu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Komponen terakhir dalam pelayanan kesehatan adalah perbekalan farmasi, dimana salah satunya adalah obat. Definisi obat menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang di lakukan oleh pemerintah diharapkan dapat merata dan terjangkau ke semua lapisan masyarakat, maka dibentuklah KONAS (Komite Obat Nasional) yang berfungsi untuk mengendalikan penggunaan obat dengan mengutamakan obat esensial dan penggunaan obat yang rasional. KONAS merupakan isi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 085/MenKes/PER/I/1989. Terbentuknya KONAS dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar, melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang salah, melindungi dari penyalahgunaan, menjamin penggunaan obat yang rasional, mencakup pembiayaan ketersediaan dan pemerataan obat di seluruh Indonesia, seleksi obat esensial, pengawasan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi.

Penyediaan obat esensial didasarkan pada DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) untuk memenuhi kebutuhan untuk menunjang kesehatan masyarakat dari segi jumlah, jenis dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dasar dari pembentukan DOEN yaitu pemenuhan kebutuhan obat esensial untuk masyarakat yang dipengaruhi empat faktor yaitu penggunaan obat rasional, harga terjangkau, penandaan yang berkelanjutan dan sistem penyediaan obat.

Program terbaru pemerintah dalam mengatasi masalah pemerataan peningkatan derajat kesehatan, yaitu dengan adanya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Program JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan dasar setiap warga negara dengan membayar iuran setiap bulan. Pengelola program tersebut yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dimulai tahun 2014. Program ini dijalankan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan milik swasta. Sarana pendukung program tersebut yaitu dengan pembuatan FORNAS (Formularium Nasional) oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan obat, ketersediaan obat dan menjamin kualitas obat yang diberikan dengan harga yang terjangkau. Selain FORNAS, pemerintah juga memberlakukan sistem e-katalog untuk mengendalikan obat – obatan yang akan diberikan kepada pasien, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan obat.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program – program yang dibuat pemerintah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah pusat saja, namun melibatkan instansi pemerintah yang berada di tiap – tiap daerah atau provinsi. Salah satu Dinas Kesehatan Provinsi yang mendapatkan tugas pembinaan dan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki empat bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan memiliki seksi Faralkes (Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan) yang berkaitan dengan sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Seksi Faralkes memiliki beberapa kewenangan yaitu dalam bidang obat, obat tradisional, psikotropika, narkotika, makanan dan minuman, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi atas kejadian keracunan. Salah satu profesi yang berada di dalam seksi Faralkes adalah apoteker. Definisi apoteker menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah salah satu tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang salah satunya adalah pengelolaan obat. Apoteker diharapkan memiliki kompetensi yang cukup dalam berbagai hal di bidang kefarmasian dari aspek ilmu pengetahuan, etika dan aspek legalitas sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas yang berada di Dinas Kesehatan terutama di Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan seksi Faralkes.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

3. Memahami dan dapat berlatih melaksanakan kegiatan terkait kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang meliputi pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta perbekalan farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan diharapkan :

1. Calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan akan praktek keprofesian agar dapat bekerja secara langsung, sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program-program pemerintah di bidang kesehatan khususnya kefarmasian di kemudian hari serta diharapkan dapat menjadi Apoteker yang berkualitas dan profesional, khususnya dalam pelayanan di institusi pemerintah.
2. Calon Apoteker yang telah lulus menjadi apoteker dapat menerapkan pekerjaan kefarmasian di kemudian hari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada semua fasilitas atau sarana pelayanan kefarmasian.